

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Bangli memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar berupa danau yang luasnya mencapai 1.067,50 ha yang dikeliling oleh sederatan pegunungan seperti Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Tuluk Biu. Danau Batur merupakan danau yang terbentuk dari kaldera bekas letusan gunung Batur, suhu airnya berkisar antara 26-28°C dengan kedalaman rata-rata 50,8 m, dan volume air 815,38 juta m³, jenis ikan yang dapat berkembang dan dibudidayakan dengan baik di daerah tersebut yaitu ikan mujair dan ikan nila¹

Pembudidaya ikan merupakan pelaku ekonomi yang secara signifikan dapat menyerap tenaga kerja, hal ini dikarenakan potensi perikanan yang ada cukup besar yaitu 15,59 juta Ha (air tawar 2,23 juta Ha, air payau 1,32 juta Ha dan sisanya perikanan laut seluas 8,37 Ha) Namun sampai saat ini pemanfaatannya baru mencapai 10,1 % untuk budidaya ikan air tawar, 40 % untuk budidaya air payau dan 0,1 % untuk budidaya laut . Dengan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang cukup banyak merupakan kesempatan atau peluang besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pembudidayaan ikan²

Ikan nila memiliki potensi ekonomi yang sangat baik untuk dikembangkan di Bali. Hal ini tampak dari hasil penelitian dasar potensi

¹ Bangli dalam Angka Tahun 2008. hlm.3

² Direktorat Jendral Perikanan Budidaya.. *Penyuluhan dan pemanfaatan Dana Penguatan modal, Direktorat Usaha Budidaya.* 2007. hlm.1

ekonomi daerah Bali dalam rangka pengembangan komodite unggulan usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2006. Disimpulkan bahwa daerah Bali memiliki 19 jenis komodite unggulan. Khusus Kabupaten Bangli, komoditas yang diunggulkan dari Sub Sektor Perikanan adalah ikan nila. Hal ini terjadi karena Kabupaten Bangli memiliki kawasan danau yang merupakan kawasan alam yang sangat cocok untuk pengembangan ikan nila. Selain itu didukung juga dengan adanya konsep satu kawasan satu produk yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Propinsi Bali.

Pembudidayaan ikan nila mempunyai prosepek yang cukup baik dan menjadi produk unggulan Propinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Bangli pada khususnya, sehingga pembudidayaan ikan nila dikawasan Danau Batur mendapat perhatian khusus dari Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Bangli dengan tujuan produktifitas bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta restoran yang ada di daerah Kintamani sehingga Kintamani terkenal dengan masakan kulinernya berupa hidangan ikan nila dan ikan mujair³. Ikan Nila tidak hanya bisa dikembangkan di kawasan danau dengan sistem keramba jaring apung saja, namun ikan nila juga dapat dikembangkan pada kolam air tenang yang ada diseluruh Bali. Dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk serta sebagai potensi ekspor. Potensi Danau Batur selain sebagai tujuan wisata juga mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan masyarakat disekitar danau yaitu dipergunakan sebagai tempat mencari nafkah atau mata pencaharian sebagai nelayan dan sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Potensi perikanan tersebut

³ Bank Indonesia. *Pola Pembiayaan Budidaya Ikan Nila di Provinsi Bali*, Tim Ekonomi Moneter, Kelompok Pemberdayaan sektor Riil dan UMKM. 2007. hlm.3

dimanfaatkan oleh warga setempat untuk memelihara ikan dengan cara mempergunakan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dibuat dengan sederhana menggunakan kayu, bambu, pipa dan drum atau steroform. Bentuk KJA berupa bujur sangkar dengan volume rata-rata $(4 \times 4 \times 4) \text{ m}^3$ dan $(5 \times 5 \times 4) \text{ m}^3$. KJA tersebut diusahakan oleh beberapa kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan produktifitas ikan sehingga bisa mencukupi kebutuhan lokal dan bahkan ekspor.

Budidaya ikan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Batur telah dikembangkan sejak tahun 1999 sesuai data statistik Dinas Peternakan dan Perikanan Darat Kab. Bangli, bahwa tahun 2008 menunjukkan jumlah KJA di kawasan Danau Batur berjumlah 1.450 buah dengan ukuran $4,0 \times 4,0 \text{ m}$ dengan produksi 203,5 ton terbagi menjadi 28 kelompok yang tersebar di pesisir barat Danau Batur. Data produksi tersebut menunjukkan bahwa dari total luas 23.200 m^2 baru 60 % dari sasaran produksi yang dapat dicapai⁴

Perkembangan pembudidayaan ikan nila dengan KJA menunjukkan peningkatan yang cukup pesat hal bisa dilihat dengan semakin banyaknya terdapat KJA disekitar pesisir Danau Batur. Pembudidaya ikan nila dengan KJA dilakukan dikarenakan mempunyai beberapa alasan secara ekonomi memberikan keuntungan bagi pelakunya, dampak sosial dapat diterima masyarakat setempat karena bersinergi dengan lingkungan, serta banyak memerlukan tenaga kerja.

⁴ Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli Tahun 2008. hlm. 4

Produktivitas ikan nila yang terjadi sekarang ini di Danau Batur dengan KJA oleh masyarakat hasilnya kurang optimal, hal ini disebabkan beberapa kendala atau hambatan seperti :

- a. Minimnya pengetahuan petani ikan tentang cara pemeliharaan dengan KJA, lokasi penempatan KJA, cara penebaran benih, mutu benih, kekurangan benih, pemberian pakan yang tidak sesuai dengan aturan.
- b. Kurangnya permodalan dari para pembudidaya ikan nila disebabkan kurangnya kepercayaan lembaga keuangan sebagai pemilik modal untuk mengucurkan kreditnya kepada petani ikan.
- c. Sulitnya untuk mendapatkan benih ikan yang mempunyai kualitas yang baik, karena selama ini hanya disuplai oleh Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Sidembunut⁵.

Bentuk nyata dari kepedulian pemerintah kepada para nelayan dan pembudidaya ikan yaitu dengan dibangunnya fasilitas perikanan di pinggir danau, penebaran benih di danau dan perhatian kepada pendeder dan pembudidaya ikan. Selain itu kepedulian lain adalah dimasukkannya beberapa program dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui APBD dan APBN yang berupa bantuan permodalan dan investasi yang telah dilakukan.

Program pemerintah yang sedang berjalan adalah pengembangan budidaya ikan dengan bantuan berupa kredit dengan bunga ringan yang dinamakan bantuan Dana Penguatan Modal (DPM). DPM merupakan dana yang dialokasikan oleh Dirjen Kelautan dan perikanan yang tujuannya untuk

⁵ Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli Tahun 2008. hlm.8

membantu pembudidaya ikan skala kecil untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan memperkuat perekonomian masyarakat terutama pembudidaya ikan skala kecil. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembudidaya ikan skala kecil merupakan pelaku ekonomi yang secara signifikan akan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak⁶

Pemerintah Kabupaten Bangli dengan program yang ada melalui Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Mina Werdhi Lestari Bangli telah menyalurkan atau mengucurkan DPM kepada kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) mulai tahun 2006 yang dengan sasaran para pendeder dan pembudidaya ikan.

Upaya pendekatan dalam penguatan perekonomian masyarakat terutama pembudidaya ikan skala kecil seperti :

1. Pendekatan teknokratis yaitu pendekatan yang diawali dengan lebih dahulu menetapkan program-program dan kelompok-kelompok sasaran (*target*), kemudian dilanjutkan dengan membakukan sistem penyaluran (*delivery sistem*), bagi kelompok-kelompok sasaran, mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta mengeluarkan anggaran pendukung pelaksanaan teknis.
2. Pendekatan partisipatif dengan memfokuskan kegiatan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memperkuat kemandirian (*community self-reliance*). Masyarakat dibantu didampingi dan difasilitasi untuk melakukan analisis masalah keuangan yang dihadapi, diberikan peluang memutuskan apa yang dikehendaki dan inisiatif mereka menjadi

⁶ Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. *Penyuluhan dan pemanfaatan Dana Penguatan modal, Direktorat Usaha Budidaya*. 2007. hlm.7

basis kegiatan. Peran pemerintah sebagai fasilitasi dan memberikan dukungan inisiatif kepada masyarakat.⁷

Pemberdayaan usaha lokal yang telah banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah budidaya perikanan. Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembudidayaan ikan adalah : Meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam kegiatan usaha budidaya perikanan, membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan DPM dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu 1) pencairan DPM ke rekening UPP untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman ; 2) penyaluran pinjaman kepada Pokdakan; dan 3) pengembalian pinjaman melalui mitra usaha⁸.

Penyaluran DPM dapat dibagi dua yaitu untuk pembudidaya ikan sebesar 80 % dan sisanya 20 % untuk pendeder. Pembagian dilakukan karena untuk usaha pembudidaya ikan lebih banyak memerlukan biaya dibandingkan dengan pendeder. Selain itu masyarakat yang bergerak dibidang pembudidaya ikan lebih banyak.

Berdasarkan data laporan bulanan PPTK Perikanan budidaya yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bangli, penerima Dana Penguatan Modal (DPM) melalui Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Mina Werdhi Lestari sampai Maret 2009 yaitu sejumlah Rp. 1.341.000.000 dengan rincian penyaluran pertama sebesar Rp. 821.000.000, Perguliran

⁷ Ibid hlm. 11

⁸ Ibid hlm. 11

tahap dua sebesar Rp. 120.000.000- dan Perguliran tahap ketiga sebesar Rp. 400.000.000⁹.

Data Dinas Peternakan Perikanan Darat Kabupaten Bangli tahun 2009 yang mendapat bantuan Dana Penguatan Modal tersebar di kelompok budidaya ikan, kelompok ini tersebar di Kabupaten Bangli seperti Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku, Kecamatan Susut dan Kecamatan Kintamani, kelompok pembudidaya ikan yang paling banyak adalah di Kecamatan Kintamani sebanyak 28 kelompok diantaranya terdapat di daerah penelitian yaitu pesisir Danau Batur yang merupakan binaan dari Dinas Peternakan Perikanan Darat Kabupaten Bangli, kelompok ini merupakan sasaran program pemberdayaan masyarakat dengan Dana Penguatan Modal.

Dengan adanya uraian pada latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Dusun Tirta Usada, Desa Batur Tengah mengenai Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal Melalui Pemberdayaan Budidaya Ikan Nila Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini karena daerah tersebut telah berdiri kelompok Gapoktan Werdi Guna, dengan jumlah anggota 107 orang dan telah mendapatkan Dana Penguatan Modal sejak tahun 2006, dalam memberdayakan masyarakat melalui pembudidayaan ikan.

⁹ Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Bangli. *Laporan Bulanan Penyuluhan Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Perikanan Budidaya*. 2009.hlm.3

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Apakah ada hubungan antara Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal dengan Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.
2. Apakah ada Hubungan antara Respon Masyarakat dengan Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.
3. Apakah ada Hubungan antara Partisipasi Masyarakat dengan Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.
4. Apakah ada hubungan antara Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal, Respon Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama dalam Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui hubungan antara Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.

2. Untuk mengetahui hubungan antara Respon Masyarakat dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.
3. Untuk mengetahui hubungan antara Partisipasi Masyarakat dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pembudidaya di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.
4. Untuk mengetahui Hubungan antara Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal, Respon Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pembudidaya Ikan Nila secara bersama-sama di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah nantinya bisa bermanfaat secara teoritis dan secara praktis seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang nantinya didapat yaitu adanya bahan masukan untuk memperkaya teori-teori tentang pemberdayaan masyarakat khususnya budidaya Ikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah nantinya hasil penelitian ini ada manfaatnya sebagai acuan dalam pelaksanaan program pemerintah dalam pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal melalui Budidaya Ikan Nila dan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORITIK

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Banyak konsep-konsep pembangunan di negara berkembang menemui kegagalan karena memisahkan pembangunan ekonomi dari pembangunan sosial. Sektor-sektor yang selama ini dikelompokkan dalam bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terabaikan dan terkalahkan oleh sektor-sektor dalam kelompok ekonomi. Dalam sistem pembangunan nasionalpun katagorisasi itu diikuti sehingga ada kesan bahwa sektor-sektor sosial kurang diperhatikan.

Sesuai dengan UUD 1945, bahwa ekonomi Indonesia berdasarkan ekonomi kerakyatan atau Demokrasi ekonomi yang secara harfiah berarti kedaulatan rakyat dibidang kehidupan ekonomi dimana ” *produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang* ” kemajuan yang ingin diupayakan, melalui pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi, haruslah meningkatkan kemakmuran atas dasar keadilan sosial sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong

terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri serta mampu mengatasi tantangan persoalan dimasa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya¹⁰. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini dipandang lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*)

Pemberdayaan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi lokal dan memikirkan potensi andalan daerah. Sehingga apa yang dicanangkan merupakan suatu kebijakan yang berpedoman pada kearifan lokal dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, proses, serta pemanfaatan hasil agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Program-program pemerintah yang tujuannya baik seperti pemberdayaan masyarakat harus sejalan dengan kultur masyarakat sehingga kearifan lokal bisa terpenuhi dan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Untuk itu institusi lokal seperti Desa Pakraman atau Desa Adat perlu dilibatkan.

¹⁰ Ginanjar, Kartasasmita. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Cides. 1996. hlm.141

Proses pemberdayaan tidak bisa dilakukan secara instan atau cepat namun diperlukan proses dan tahapan pemberdayaan mulai dari penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Tahap pertama adalah penyadaran dimana diperlukan kesadaran pihak-pihak yang akan diberdayakan, bahwa mereka bisa keluar dari keterbelakangan atau kemiskinan bila ada kemauan. Kesadaran untuk bisa meningkatkan kesejahteraan diawali dari diri sendiri sebab bila tidak ada kemauan maka seberapa hebatnya program pemerintah tidak akan berhasil. Disinilah diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat penerima program. Partisipasi dapat dimulai dalam perencanaan agar program tersebut sesuai dengan kondisi alam dan potensi lokal yang ada. Partisipasi proses yaitu ikut dalam proses pelaksanaan program sehingga program bisa berjalan sesuai dengan tujuan untuk mengentaskan dan meningkatkan kesejahteraan.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan (*capacity Building*) atau memampukan masyarakat atau individu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberi pelatihan sehingga mereka mempunyai keahlian secara organisasi maupun individu sebelum suatu program diberikan. Jika tahap ini telah dilakukan kemungkinan kegagalan program akan bisa ditekan seminimal mungkin.

Tahap ketiga adalah pendayaan atau memberi mereka wewenang atau kekuasaan sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki¹¹. Dalam pemberdayaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal dan internal. Faktor internal seperti modal, kemampuan atau skill (SDM),

¹¹ Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugraha Dwidjowijoto. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia. 2007. hlm.2

kelembagaan. Dan faktor eksternal adalah modal, pemasaran, manajerial dan jaringan atau kemitraan. Mengapa modal terdapat pada kedua faktor tersebut, hal ini dikarenakan modal tersebut dapat dari modal sendiri dan modal dari luar seperti bantuan bank, dalam hal berupa Dana Penguatan Modal (DPM). Program DPM ditujukan kepada pembudidaya ikan nila skala kecil, sebab pembudidaya ini merupakan petani yang memiliki kondisi kekurangan sehingga mereka dalam memenuhi hasil produksi ikan masih minim, sebab hanya bisa memenuhi kebutuhan makan saja. Faktor penyebab kemiskinan dikarenakan beberapa penyebab selain kondisi daerah. Kemiskinan merupakan kesenjangan antar lapisan masyarakat sehingga untuk pengentasan kemiskinan agar dicari penyebab atau akar permasalahan mengapa hal itu menjadi penyebab.

Kemiskinan merupakan masalah setiap negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dimana angka kemiskinan makin tahun bukan berkurang malah semakin meningkat. Jumlah persentase penduduk miskin pulau Bali tahun 1993-2001 adalah 270,2 ribu, 125,6 ribu, 246,4 ribu prosentasenya sebesar 7,87 %. Ditahun 1996 mengalami penurunan dari 270,2 ribu menjadi 125,6 ribu namun tahun 2001 terjadi lonjakan sebesar 246,4 ribu. Ini menunjukkan makin tahun kemiskinan makin meningkat.

Dalam kajian teoritik terdapat beberapa pandangan dalam membuat klasifikasi kondisi kemiskinan, salah satunya adalah klasifikasi kemiskinan menjadi : kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang ditimbulkan sebagai akibat sumber daya yang langka atau karena tingkat perkembangan teknologi yang

sangat rendah.¹² Kemiskinan kultural adalah kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh karena nilai-nilai budaya masyarakat tidak mendorong bahkan cenderung menghambat semangat berusaha untuk meningkatkan kondisi kehidupan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh segolongan masyarakat, yang karena struktur sosialnya menyebabkan golongan tersebut tidak dapat menggunakan sumber- sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Di Indonesia terdapat dua aliran pemikiran yang berkembang berkaitan dengan pemahaman terhadap kemiskinan. Golongan pertama adalah penganut paradigma *agrarian populism* yaitu kemiskinan diakibatkan adanya campur tangan negara yang terlalu luas dan mendalam terhadap kehidupan petani. Adanya intervensi mengakibatkan petani cenderung menjadi obyek yang tidak memiliki inisiatif memanfaatkan peluang, potensi dan sumberdaya yang melimpah diseperti mereka. Golongan kedua biasa dimotori oleh pejabat pemerintah atau ilmuwan kampus yang mengatakan kemiskinan sebagai masalah budaya, petani menjadi miskin karena memiliki budaya kemiskinan, karena malas bekerja, tidak memiliki visi yang jelas tentang masa depannya.

Kemiskinan petani dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (1) kemiskinan ekonomi, (2) kemiskinan sosial, (3) kemiskinan politik. Kemiskinan ekonomi karena kurangnya sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau orang. Secara ekonomi kemiskinan para petani dimaknai sebagai kurangnya sumberdaya para petani yang dapat digunakan

¹² Alfian. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta :Universitas Indonesia (UI-Press) .1986, hlm. 143

untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan diartikan sebagai kesejahteraan ekonomis yang mencakup pengertian finansial dan non finansial, petani dikatakan miskin karena sumber ekonomi yang mereka punya dibawah target atau patokan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan sosial adalah kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung orang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktifitasnya meningkat. Sedangkan kemiskinan politik adalah rendahnya derajat akses terhadap kekuatan (*power*) yang dapat menentukan alokasi sumberdaya bagi seseorang untuk dapat mewujudkan kesejahteraannya¹³. Upaya pengentasan kemiskinan dalam Program & Kegiatan Departemen Kelautan dan Perikanan yaitu : melalui kegiatan :

- a. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
- b. Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (PUKPB)
- c. Pengembangan Kemitraan Melalui Kluster Industri Perikanan
- d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan,
- e. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)¹⁴.

1.2 Kebijakan Pemecahan Masalah Kemiskinan

Dalam memecahkan permasalahan kemiskinan bukan saja merupakan tugas pemerintah saja, namun diperlukan kerja sama yang baik serta adanya partisipasi masyarakat dan kemauan masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan, jika kesadaran masyarakat tidak timbul

¹³ Sunartiningsih, Agnes. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media. 2004, hlm. 211

¹⁴ Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. *penyuluhan dan pemanfaatan Dana Penguatan modal, Direktorat Usaha Budidaya*. 2007, hlm. 27

maka bagaimanapun hebatnya program pengentasan kemiskinan akan sia-sia sebab tidak ada dukungan dari bawah. Dan malah bantuan yang diberikan pemerintah akan menjadi sumber kemalasan masyarakat untuk keluar dari masalah kemiskinan, sebab timbul rasa malas masyarakat karena ada bantuan yang telah datang. Disinilah diperlukan suatu kajian yang baik dalam mencari solusi cara pengentasan kemiskinan.

Kebijakan-kebijakan dalam rangka pemecahan masalah pengentasan kemiskinan perlu dirumuskan semua pihak sehingga mempunyai formula yang baik sehingga tujuan pengentasan kemiskinan bisa teratasi dengan lancar dan timbul kesejahteraan masyarakat dan negara.

Kebijakan dan program pemerintah kurang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan dan mencegah proses pemiskinan dan pewarisan kemiskinan, kelemahan tersebut antara lain:

- a. Sistem dan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat,
- b. Kebijakan bersifat sektoral, terpusat dan seolah-olah kemiskinan hanya menjadi urusan pemerintah semata,
- c. Kurangnya kolaborasi multi pihak,
- d. Program bersifat parsial tidak mencakup semua aspek dan dimensi dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan,
- e. Memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak berdaya dengan lebih banyak memberikan bantuan ketimbang memberdayakan sehingga menciptakan ketergantungan, melemahkan daya inovatif, kreatifitas dan daya juang serta daya saing masyarakat,

- f. Masalah kemiskinan dipandang sama di semua wilayah,
- g. Ketergantungan pada pembiayaan dari donor¹⁵.

2. Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 308/DPB/PM.220.D5/I/2007 dikatakan bahwa Dana Penguatan Modal merupakan salah satu program Dirjen Perikanan Budidaya yaitu untuk menumbuh kembangkan usaha budidaya ikan skala kecil. Penyaluran dan pemanfaatan DPM tidak terpisah dengan kegiatan lain dan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi¹⁶. Hal yang diinginkan dari program ini adalah supaya para pembudidaya ikan tumbuh rasa motivasi dan bisa bekerja sama dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki dan potensi sumber daya alam perikanan yang ada.

Dana Penguatan Modal bagi pembudidaya ikan skala kecil merupakan salah satu program untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan skala kecil serta komponen pendukung dalam pelaksanaan program Propekan, proksimas, dan prolinda bagi pengembangan usaha kelompok pembudidaya ikan skala kecil.

Dana Penguatan Modal (DPM) adalah dana yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan, yang tertuang dalam Daftar Isian Perincian Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), dialokasikan dalam Belanja Sosial pada mata Anggaran 57xxxx dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung usaha pembudidayaan ikan,

¹⁵ Sunartiningsih, Agnes. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media. 2004, hlm. 33

¹⁶ Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. *Penyuluhan dan pemanfaatan Dana Penguatan modal, Direktorat Usaha Budidaya*. 2007, hlm. 33

termasuk didalamnya usaha pembenihan dan pembesaran ikan. Dana Penguatan Modal merupakan dana APBN yang dialokasikan untuk pengembangan usaha pembudidayaan ikan skala kecil yang disalurkan kepada UPP sebagai wadah Pokdakan. Dana tersebut oleh UPP dijadikan jaminan kepada perbankan dalam menyalurkan pinjaman permodalan kepada Pokdakan. Dana Penguatan Modal bagi Pembudidaya ikan skala kecil merupakan salah satu program untuk peningkatan pendapatan pembudidaya ikan skala kecil serta sebagai komponen pendukung dalam pelaksanaan program propekan, proksimas, dan prolinda bagi pengembangan usaha kelompok pembudidaya ikan skala kecil¹⁷.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha perikanan budidaya skala kecil antara lain : belum adanya kebijakan yang mampu menyerasikan antara produksi dan daya serap pasar serta kebijakan tentang kemudahan akses pembiayaan. Program pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil melalui dukungan Dana Penguatan Modal (DPM) yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perikanan Budidaya dimaksudkan untuk mendorong pembudidaya ikan dalam pemanfaatan potensi yang ada melalui penyediaan pinjaman modal kerja yang diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan manajemen usaha.

Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) telah mewujudkan dengan mengucurkan Dana Penguatan Modal kepada kelompok binaannya yaitu kelompok Mina Werdhi Lestari yang merupakan gabungan petani ikan seluruh Kabupaten Bangli, program DPM

¹⁷ Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. *Penyuluhan dan pemanfaatan Dana Penguatan modal, Direktorat Usaha Budidaya*. 2007, hlm. 4

sama dengan program pemerintah lainnya yaitu bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat terutama pembudidaya ikan skala kecil. Dalam pelaksanaan program tersebut dilakukan suatu pendekatan sehingga program tersebut menyentuh langsung kepada pembudidaya ikan dengan skala kecil.

Dana Penguatan Modal dialokasikan berdasarkan :

- a. Potensi sumber daya perikanan budidaya (alam dan manusia) yang dimiliki Kabupaten/Kota serta mempunyai peluang untuk dikembangkan (adanya data pendukung perencanaan kawasan dan perencanaan wilayah yang terintergrasi)
- b. Hasil evaluasi Dirjen tentang pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan DPM (pemanfaatan, produksi, dan pengembalian)
- c. Komitmen daerah yang diwujudkan dalam kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan potensi sumberdaya perikanan budidaya meliputi : (a). Peraturan Daerah yang mendukung pengembangan usaha perikanan, (b). Penyediaan dana pembinaan dan administrasi yang digunakan untuk penguatan kelembagaan usaha Pokdakan diantaranya : Pelatihan manajemen usaha, dukungan dan operasional TPT, dukungan operasional UPP dan pembinaan UPP, fasilitas kemitraan usaha, monitoring dan evaluasi dan koordinasi¹⁸

2.1. Pemasaran, Pola Kemitraan dan Konsep Kemitraan

Pemasaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu dunia usaha dan menjadi perhatian besar oleh perusahaan besar maupun berskala kecil. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam

¹⁸ Ibid hlm. 8

perekonomian yang membantu menciptakan nilai ekonomi, disamping pemasaran merupakan faktor penting dalam siklus yang berawal dan berakhir dengan kebutuhan konsumen. Informasi pasar yang jelas merupakan indikasi untuk memproduksi suatu produk untuk mendapat keuntungan.

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan memperhatikan produk yang bernilai dengan pihak lain¹⁹. Pemasaran adalah segala sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial.

Pola kemitraan dalam suatu usaha dapat dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik didalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya, serta pola kemitraan agribisnis memiliki dua pola yaitu pola vertikal dan pola horisontal.

Konsep kemitraan perlu ditetapkan oleh pemerintah untuk mendorong mengoptimalkan dan mengatasi masalah kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan jalan mengadakan hubungan kemitraan antara petani dengan pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses teknologi, modal, pasar, informasi dan kelembagaan ekonomi

¹⁹ Kotler, Philip dan Gary Armstrong. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta : Intermedia.2002, hlm. 9

sehingga dibutuhkan kemitraan dengan pemilik modal atau penemu inovasi-inovasi pertanian.

Kemitraan merupakan sebagai jalinan kerjasama usaha antara usaha kecil melalui pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Secara rinci tujuan dalam pelaksanaan kemitraan adalah (1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. (2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. (3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. (4) memperluas kesempatan kerja dan. (5) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional²⁰.

2.2.Pengembangan Produksi Ikan di Kabupaten Bangli

Pembangunan perikanan diarahkan untuk menciptakan perekonomian rakyat yang tangguh dan mandiri dalam rangka menghadapi persaingan yang makin ketat. Sasaran dari pengembangan perikanan adalah meningkatkan kualitas produksi dan pendapatan petani ikan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan sektor perikanan tersebut Dinas Peternakan Perikanan darat kabupaten Bangli merencanakan program utama yaitu :

²⁰ Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha : konsepsi dan strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan. 2000, hlm. 39

- a. Peningkatan sarana dan prasarana produksi
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan, peningkatan mutu dan pemasaran
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan²¹

2.3. Budi Daya Ikan Nila

Ikan Nila diduga berasal dari Benua Afrika, dagingnya mengandung protein yang tinggi untuk kebutuhan tubuh, dan pada umumnya dibudidayakan di kolam-kolam buatan atau perairan bebas. Pengembangan ikan Nila di Indonesia dirintis pada awal pelita pertama tahun 1969, yaitu dengan mendatangkan bibit ikan Nila dari Taiwan. Tahun 1971 ikan Nila telah disebarluaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut berdasarkan hasil percobaan dan adaptasi pada kolam yang dilaksanakan lembaga Penelitian Perikanan Darat di Bogor.

Karakteristik ikan Nila sangat mirip dengan ikan Mujair (*Tilapia mossabica petera*). Perbedaan yang khas dan mudah dikenali antara kedua jenis ikan tersebut adalah pada sirip ekor ikan Nila terdapat garis-garis vertikal. Sedangkan pada sirip punggung garis-garis itu condong letaknya; pada ikan Mujair garis-garis pada sirip punggung tidak sejelas garis-garis pada ikan Nila, sedangkan sirip ekor ikan Mujair sama sekali tidak

²¹ Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Bangli. *Propil Perairan Pedalaman Danau Batur Kecamatan Kintamani Kab.Bangli*. 2006, hlm. 9

bergaris. Ada dua jenis ikan nila yang berkembang di Indonesia yaitu Nila hitam (*Citralada, GIFT, aurea*). dan Nila merah (*hibrid*).²²

Ikan Nila memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh ikan Nila antara lain sebagai berikut :

- a. Ikan Nila memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat dimana dalam waktu 6 bulan dari benih ikan berbobot 30 gram/ekor dapat mencapai 300-500 gram/ekor. Ikan Nila yang berumur 5 bulan dapat mencapai bobot rata-rata 300 gram/ekor. Sedangkan pada umur 8 bulan berat badan ikan Nila sudah bisa mencapai 500-600 gram/ekor.
- b. Kematangan kelamin ikan Nila (dewasa kelamin) tergolong cepat. Pada umur 5-6 bulan ikan Nila sudah dapat memijah (kawin) dan setelah 1-1.5 bulan sudah dapat memijah kembali. Benih ikan Nila yang dapat dihasilkan oleh setiap ekor ikan Nila betina yang beratnya 300 gram/ekor adalah sekitar 1.000-1.500 benih ikan.
- c. Ikan Nila mudah dibudidayakan baik di air tawar maupun air payau. Bahkan pada lingkungan yang kualitas airnya jelek dan Ph yang asam ikan Nila masih dapat tumbuh dengan baik.
- d. Daging ikan Nila cukup tebal dan tidak terdapat duri-duri halus dalam dagingnya. Duri-duri Ikan Nila hanya terdapat di tengah-tengah sepanjang tubuhnya, sehingga mudah untuk dikonsumsi. Berat daging ikan Nila dapat mencapai 40 % dari berat badannya.
- e. Daging ikan Nila tidak lembek dan rasanya enak.

²² Bank Indonesia. *Pola Pembiayaan Budidaya Ikan Nila di Provinsi Bali*, Tim Ekonomi Moneter, Kelompok Pemberdayaan sektor Riil dan UMKM. 2007, hlm. 9

- f. Dari segi harga, ikan nila lebih murah dari pada ikan Gurami dan ikan Mas, sehingga terjangkau oleh semua kalangan²³.

Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk membuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersil²⁴

Ada beberapa teknik dalam pembudidayaan yang akan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas lahan yang tersedia. Namun teknik-teknik tersebut disesuaikan dengan peruntukan lahan dan sistem budidaya perikanan berdasarkan jenis wadah yang digunakan antara lain Karamba Jaring Apung (KJA) atau populer dengan sebutan jaring Keramba Apung (Jakapung), Kolam Air Deras (KAD), Kolam Air Tenang (KAT), dan Karamba. Dengan wadah-wadah tersebut para pembudidaya ikan tinggal memilih jenis ikan yang sesuai untuk dibudidayakan. Untuk ikan Nila bisa dikembangkan dengan menggunakan KJA, KAD, KAT maupun dalam Karamba²⁵.

Budidaya ikan dengan KJA merupakan jenis budidaya yang memanfaatkan badan air semaksimal mungkin sebagai media budidaya. Menurut Effendi (1991) KJA merupakan budidaya ikan intensif dengan ciri

²³ Cahyono, Bambang. *Budi daya Ikan Air Tawar*. Cetakan keenam. Yogyakarta : Kanisius. 2005, hlm. 10

²⁴ Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. *Penyuluhan dan pemanfaatan Dana Penguatan modal, Direktorat Usaha Budidaya*. 2007, hlm. 4

²⁵ Bank Indonesia. *Pola Pembiayaan Budidaya Ikan Nila di Provinsi Bali*, Tim Ekonomi Moneter, Kelompok Pemberdayaan sektor Riil dan UMKM. 2007, hlm. 11

kepadatan penebaran yang tinggi yang ditunjang dengan pemberian pakan ikan secara terencana. Teknik KJA kini tidak hanya dikembangkan diperairan waduk-waduk atau danau tapi sudah banyak diperairan laut. Dalam pemeliharaan ikan ini KJA merupakan media pembatas ruang gerak ikan, sedangkan air merupakan media hidup. Budidaya ikan dalam KJA merupakan salah satu teknik budidaya ikan air tawar intensif yang mempunyai sifat padat sarana produksi dengan produktifitas tinggi.

Kondisi lingkungan hidup yang mendukung perkembangan ikan Nila secara optimal adalah 14 - 38°C, aktivitas perkembangbiakan 25 - 30°C, pemijahan 22-37°C, Ph air berada pada kisaran 7,0 – 8,0, toleran terhadap kadar salinitas dengan kisaran 0 -29 per mil. Kandungan oksigen air minimal 4 mg/lit dan kandungan karbon dioksida maksimal 5 mg/lit. Kadar amoniak dalam air harus dalam batas yang tidak meracuni (lebih rendah 0,1 mg/lit). Selain masalah kondisi diatas ada beberapa hal yang penting dalam pengembangan komoditu ikan Nila antara lain :

1. Memiliki resistensi yang relative tinggi terhadap kualitas air dan penyakit
2. Memiliki toleransi yang kuat terhadap lingkungan
3. Memiliki kemampuan yang efisien dalam membentuk protein kualitas tinggi dari bahan organik, limbah domestic dan pertanian.
4. Mudah tumbuh dalam sistim budidaya intensif.

Beberapa kebijakan dan langkah yang ditempuh dalam pengembangan budidaya ikan dengan KJA antara lain :

1. Meningkatkan produktifitas dan produksi perikanan melalui :

- a. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi yang disertai dengan peningkatan prasarana budidaya.
 - b. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya manusia.
 - c. Peningkatan kapastian kelembagaan petani ikan
 - d. Pengendalian dan pengawasan pembangunan budidaya perikanan.
2. Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan yang diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi (usaha, investasi dan prasarana). Perikanan terpadu adalah perikanan berbasis iptek, dan manajemen yang profesional pada setiap mata rantai usaha bidang perikanan. Hal ini ditempuh dalam rangka menghasilkan nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Untuk mewujudkan atau merealisasikan harus ditunjang dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, serta program kemitraan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan baik secara sosial maupun ekonomi²⁶.

Bukti empiris menunjukkan bahwa usaha perikanan KJA mempunyai kemampuan kompetitif secara ekonomi dibandingkan dengan usaha perikanan air tawar intensif lainnya seperti kolam air deras. Jenis ikan paling banyak dibudidayakan dalam KJA adalah ikan Nila. Sadeli dan Sony, (1989) dalam Penyaluran dan pemanfaatan Dana Penguatan Modal (DPM) Bagi pembudidaya Ikan Skala Kecil .

2.4. Budidaya Ikan Nila di KJA Danau Batur

Untuk kebutuhan benih dasar di Kabupaten Bangli, terkait dengan usaha budidaya ikan di KJA Danau Batur masih sangat tergantung dari UPTD

²⁶ Usni Arie. *Pembenihan dan Pembesaran Nila Gift*. Jakarta : Swadaya. 2000, hlm.11

BBI Dinas Perikanan Kabupaten Bangli, ini disebabkan karena keberadaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) masih sangat minim dalam mendukung penyediaan benih dasar, saat ini hanya ada 2 unit UPR yang aktif untuk pembenihan ikan Nila dengan luas kurang lebih 4.800 m² mampu memproduksi benih dasar dengan ukuran 1-3 cm sebanyak 1.050.000 ekor per tahun.

Adanya berbagai program pemerintah pusat maupun daerah disektor perikanan secara tidak langsung membuat semakin berkembangnya usaha budidaya ikan di KJA Danau Batur. Saat ini Danau Batur dimanfaatkan sebagai wadiah KJA seluas 3,32 Ha yang terdiri dari 20 kelompok pembudidaya serta 10 merupakan perorangan. Dengan jumlah petak 1.450 buah dengan ukuran rata-rata 16 m² per petak dengan kapasitas benih ukuran 7-9 cm dengan padat tebar 2.000 ekor per musim tanam. Sehingga dalam 1 tahun kebutuhan benih ikan di Danau Batur mencapai 6.000.000 ekor, suplai benih dari Kabupaten Bangli 3.000.000 ekor. Sedangkan dari Kabuapten lain hanya mampu memenuhi 1.000.000 ekor sehingga per tahunnya KJA di Danau Batur kekurangan benih \pm 2.000.000 ekor, (Dinas Peternakan dan Perikanan Darat Kab.Bangli, 2008)²⁷.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha perikanan, dan untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan peran perbankan, maka program-program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan

²⁷ Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Bangli. *Laporan Bulanan Penyuluhan Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Perikanan Budidaya*. 2009, hlm. 3

budidaya senantiasa dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengedepankan peran aktif pembudidaya ikan selaku pelaku usaha.

3. Respon Masyarakat terhadap Program DPM

Pelaksanaan program berbentuk apapun yang dikeluarkan pemerintah harus ikut melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan. Tujuan dari hal tersebut adalah memberi kesempatan kepada masyarakat ikut memberikan kebijakan dalam ikut melaksanakan pembangunan. Seperti halnya pelaksanaan program Dana Penguatan Modal yang merupakan program Departemen Kelautan yang dituangkan dalam APBN tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada respon masyarakat, maka program tersebut akan mubasir. Disinilah diperlukan pengkajian dan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat²⁸

Ada beberapa prinsip yang dipegang dalam perencanaan pembangunan yaitu :

- a. Pembangunan harus mengikutsertakan masyarakat luas sejak perencanaan yang dapat menjamin terwujudnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial dan lingkungan.
- b. Peranan Desa adat dan lembaga-lembaga adat harus ditingkatkan mengingat akar budaya Bali ada di desa adat, karena itu hubungan antara pembangunan dan budaya lokal harus dikelola sehingga tumbuh hubungan yang saling menguntungkan.

²⁸ Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. *Penyuluhan dan pemanfaatan Dana Penguatan modal, Direktorat Usaha Budidaya*. 2007, hlm. 4

- c. Pembangunan tidak dikonsentrasikan di suatu tempat tetapi diarahkan pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan sehingga tidak terjadi kelebihan daya dukung yang dapat merusak lingkungan.
- d. Pertumbuhan dikendalikan pada tingkat moderat sehingga mudah untuk dikendalikan.
- e. Keharmonisan kebutuhan , lingkungan setempat dan masyarakat lokal harus dijaga.²⁹

4. Partisipasi Masyarakat Terhadap Program DPM

Partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, keterlibatan disini dilakukan secara aktif mulai perencanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengawasan. Tujuannya adalah adanya rasa memiliki dan memelihara hasil pembangunan. Ada beberapa pedoman dalam penyusunan kebijaksanaan yang berisikan peningkatan partisipasi yaitu :

- a. Partisipasi harus dimulai dari tingkat paling bawah yaitu mengikut sertakan kelompok penduduk paling miskin di desa.
- b. Partisipasi harus terjadi pada semua tahap proses pembangunan.
- c. Suatu dukungan semata-mata bukanlah partisipasi.
- d. Partisipasi harus mengandung isi berupa program-program nyata di bidang produksi dan distribusi.
- e. Partisipasi harus mengubah loyalitas organisasi atau kelompok yang sudah ada.

²⁹ I Made Suasthawa Dharmayuda. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar, Upada Sastra. , 2001, hlm. 14

- f. Peningkatan partisipasi akan mengundang tantangan dari pihak-pihak tertentu³⁰.

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting.

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut.
- c. Partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.³¹

5. Hasil-Hasil Penelitian yang terkait dengan Peningkatan Kesjahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan.

Hasil penelitian Pola Pembiayaan Budidaya ikan Nila di Kawasan Danau Batur mengenai model pembiayaan perbankan yang dilakukan selama ini adalah membantu petani dengan model Dana Penguatan Modal (DPM) dari Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP) yang disalurkan melalui BRI. Hampir belum ada dana bank murni yang disalurkan bagi pengembangan ikan

³⁰ Sunyoto Usman. *Jalan Terja Perubahan sosial*. Yogyakarta : Cired. 2004, hlm.53

³¹ Suparjan dan Hempri suyanto. *Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media. 2003, hlm. 65

nila, karena pihak bank belum memiliki data tentang analisis mengenai aspek keuangan budidaya ikan nila. Sementara itu, dalam keadaan tertentu (misalnya, satu bulan sebelum panen ikan, dan petani dalam kondisi tidak memiliki biaya), maka petani yang bersangkutan memberanikan diri untuk meminjam dari rentenir atau lembaga keuangan lainnya (misalnya koperasi). Dengan bunga yang cukup tinggi.

Laporan penelitian mengenai Pendapatan Usaha Tani Budidaya ikan Jaring kantong apung di Danau Batur diperoleh sebesar Rp. 1.942.040,50- per musim tanam (empat bulan). Dimana peranan faktor-faktor produksi dalam meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya ikan nila di Keramba Jaring Apung di Danau Batur dapat diurut dari faktor produksi yang paling besar peranannya sampai yang paling kecil adalah jumlah pakan, jumlah benih ikan, luas usahatani serta jumlah obat-obatan. Hal ini sangat penting diperhatikan terkait untuk meningkatkan produksi ikannya sehingga para pembudidaya ikan dapat meningkat kesejahteraannya.

6. Kerangka Konseptual Penelitian

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya ikan nila ditinjau dari Pelaksanaan Dana Penguatan Modal, Respon dan Partisipasi Masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dijabarkan dalam kerangka konseptual :

- a. Diduga ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.

- b. Diduga ada hubungan yang signifikan antara Respon Masyarakat dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.
- c. Diduga ada hubungan yang signifikan antara Partisipasi Masyarakat dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila Di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani
- d. Diduga ada hubungan yang signifikan antara Pelaksanaan Program DPM, Respon Masyarakat, Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila Di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani..

7. Hipotesis

- a. Bahwa ada hubungan antara Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal dengan Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.
- b. Bahwa ada Hubungan antara Respon Masyarakat dengan Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan Nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.
- c. Bahwa ada Hubungan antara Partisipasi Masyarakat dengan Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pembudidaya Ikan Nila di Danau Batur Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.
- d. Bahwa ada hubungan antara Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal, Respon Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama dengan Peningkatan Masyarakat pembudidaya ikan nila di Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani.